**LARANGAN KAPITALISASI TUNGGAKAN BUNGA DAN DENDA KREDIT
(PLAFONDERING) OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET BAGI
DEBITUR YANG SUDAH TIDAK MEMILIKI PROSPEK USAHA****Oleh****Danang Catur Wahyu Wijayanto****Universitas Surakarta****E-mail: Danangwijayanto1979@gmail.com**

Article History:*Received: 28-06-2023**Revised: 05-07-2023**Accepted: 31-07-2023***Keywords:***Plafondering, Kredit**Macet, Prospek Usaha*

Abstract: Bentuk penyelamatan kredit yang dilarang digunakan oleh bank yaitu penyelamatan kredit melalui kapitalisasi tunggakan bunga dan denda kredit (plafondering) bagi debitur yang sudah tidak memiliki usaha. Penelitian ini akan berfokus terkait bagaimana larangan kapitalisasi bunga dan denda kredit (plafondering) oleh bank dalam penyelesaian kredit macet bagi debitur yang sudah tidak memiliki usaha. Penelitian ini berfokus pada studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Karena data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur, maka teknik pengumpulan data yang tepat adalah studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui pengelompokan data. Hasil penelitian ini adalah Pengklasifikasian kualitas kredit penting untuk bank karena dapat membantu mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko kredit secara efektif. Dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah bank dilarang mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan peraturan dan prinsip kehati-hatian. Praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau mengakumulasi tunggakan bunga melalui kapitalisasi, yang dikenal sebagai plafondering kredit, dilarang untuk digunakan

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan mempunyai peran vital untuk menggerakkan laju pembangunan perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan dan produk finansial, perbankan memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Para pelaku ekonomi akan dengan mudah mengakses dana yang diperlukan untuk investasi dalam berbagai proyek dan usaha melalui lembaga perbankan. Kemudahan akses ini tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor bisnis, tetapi juga meningkatkan kemampuan individu untuk mengakses pendidikan, perumahan, dan konsumsi yang lebih baik. Pemberian kemudahan ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit untuk konsumtif, kredit untuk pengadaan tempat usaha dan kredit untuk modal usaha.

Kredit yang disalurkan lembaga keuangan perbankan ini sebagai pelaksanaan dari fungsi intermediasi menghubungkan antara pemilik dana simpanan (berupa deposito dan tabungan) dengan pihak yang membutuhkan dana melalui fasilitas kredit. Fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi berdasarkan pada UU Perbankan Pasal 3 yang menyebutkan fungsi pokok dari

perbankan Indonesia adalah menghimpun dana masyarakat dan penyalur kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan fungsi bank tersebut memiliki resiko tinggi terutama dalam hal penyaluran kredit. Untuk itu bank dalam menyalurkan kreditnya diwajibkan untuk melakukan analisa yang mendalam dan menyeluruh terhadap calon debitur. Adalah hal yang wajar jika tidak ada yang mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, bisnis bank penuh dengan risiko dan dikenal sebagai aset berisiko. Apabila bank tidak dapat mengelola risiko dengan baik, maka akan muncul masalah kredit atau pembiayaan yang bahkan dapat macet, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kelangsungan bisnis perbankan, nasabah penyimpan dana, dan perekonomian secara keseluruhan. (Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2016 : 8).

Krisis ekonomi tahun 1998 menjadi pengalaman kelam sejarah perbankan di Indonesia, dimana pelaku bisnis perbankan banyak yang melakukan pelanggaran terhadap *moral hazard*. Prinsip-prinsip dan norma-norma hukum terkait perbankan tidak dijalankan secara konsisten dan konsekuen oleh para pelaku bisnis perbankan. Pengawasan bank dan penegakan hukum dari regulator terkait pelanggaran para pelaku bisnis perbankan tidak dilakukan secara konsisten, tegas, transparan dan berkeadilan. Keadaan seperti ini yang mengakibatkan terjadinya krisis perbankan yang berdampak terhadap terjadinya krisis ekonomi secara nasional. Perbankan pada saat itu diibaratkan sebuah bangunan yang megah dan mewah, akan tetapi didalamnya keropos sehingga sangat mudah sekali roboh apabila terkena guncangan. Terbukti pada tahun 1997 dilakukan likuidasi 16 bank umum swasta nasional oleh pemerintah dan tahun 1999 kembali melikuidasi sejumlah 38 bank swasta nasional.

Sebagai kegiatan yang cukup berisiko, sebelum mencairkan kredit, bank seharusnya melakukan analisa kredit yang mendalam, penuh ketelitian, dan hati-hati, berdasarkan data yang terkini dan akurat, untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap pemberian kredit harus mematuhi ketentuan peraturan perbankan dan prinsip perkreditan yang sehat. Selain itu, proses pemberian kredit harus didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, dan bebas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Bank harus memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat dilunasi tepat waktu oleh debitur dan tidak berpotensi menjadi masalah atau macet. (Rachmadi Usman, 2001 : 255).

Dalam menyalurkan kreditnya bank wajib menjaga kualitas kredit yang disalurkaninya tetap selalu dalam kondisi lancar. Kualitas kredit yang mengalami penurunan akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Untuk itu bank dalam menyalurkan kreditnya berkewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini dengan melakukan analisa calon debitur secara menyeluruh dan mendalam, ketepatan dalam penyaluran kredit, adanya fungsi kontrol yang baik dan kuat, keabsahan perjanjian kredit yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan pengikatan jaminan yang dilakukan secara sempurna, serta dokumen kredit yang lengkap, hal ini bertujuan supaya kredit yang telah disalurkan dapat dibayar kembali sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Asas kehati-hatian adalah prinsip yang mengharuskan bank untuk menerapkan kehati-hatian dalam semua fungsi dan kegiatan usahanya guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Menurut Pasal 2 UU Perbankan, perbankan di Indonesia harus menjalankan usaha dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Pasal 29 UU Perbankan mengatur bahwa bank harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat (2)) dan dalam memberikan kredit atau pembiayaan, serta kegiatan usaha lainnya, harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dan mengambil langkah-langkah yang

mengutamakan kepentingan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (ayat (3)). (Rachmadi Usman, 2001 : 18).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah untuk memastikan bahwa bank selalu berada dalam kondisi sehat, *likuid, solvent*, dan menguntungkan. Dengan penerapan prinsip ini, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk menyimpan dana di bank. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan menyarankan agar ketentuan mengenai kegiatan usaha bank, terutama terkait dengan penyaluran dana, diperbaiki dan disempurnakan. Beberapa peraturan perbankan juga mencakup pedoman penerapan prinsip kehati-hatian, yang harus dipatuhi oleh bank. (Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2016 : 122).

Manajemen risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga merupakan bagian dari implementasi prinsip kehati-hatian bank selain analisa dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Bank dituntut untuk selalu mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen resiko mempunyai tujuan untuk meminimalisir kemungkinan munculnya dampak kurang baik dari perilaku para pelaku bisnis bank yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, serta aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bank dilarang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk pada saat menyelesaikan kredit bermasalah. Kredit bermasalah yang diselesaikan, harus diupayakan dengan langkah yang baik dan sesuai aturan. Dilarang menyelesaikan kredit bermasalah dengan menempuh jalan pintas yang dapat merugikan debitur maupun nasabah penyimpan dana.

Bentuk penyelamatan kredit yang dilarang digunakan oleh bank yaitu penyelamatan kredit melalui kapitalisasi tunggakan bunga dan denda kredit (*plafondering*) bagi debitur yang sudah tidak memiliki usaha. Dalam prakteknya masih ada bank yang menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara tersebut, karena dianggap lebih menguntungkan bagi bank tanpa mepedulikan efek negatif yang ditimbulkan. Penyelesaian dengan cara seperti ini akan memberikan efek yang buruk bagi dunia perbankan. Penelitian ini akan berfokus terkait bagaimana larangan kapitalisasi bunga dan denda kredit (*plafondering*) oleh bank dalam penyelesaian kredit macet bagi debitur yang sudah tidak memiliki usaha.

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini didasarkan pada penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini berfokus pada studi literatur yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan, dengan tujuan memberikan rekomendasi mengenai solusi terhadap suatu permasalahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Karena data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur, maka teknik pengumpulan data yang tepat adalah studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui pengelompokan data, disusun secara sistematis, kemudian dikaji secara deduktif-rasional, sehingga menghasilkan pemikiran yang dogmatis untuk penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggolongan Kualitas Kredit Bank

Kredit bermasalah akan selalu menjadi momok bagi para pelaku bisnis perbankan dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Bank akan selalu dihadapkan pada kredit

masalah, karena kredit bermasalah selalu menjadi bagian dalam kegiatan kredit dan pembiayaan bisnis perbankan. Meskipun bank tidak berniat untuk membuat kredit yang diberikan menjadi masalah dan berusaha keras untuk mencegah terjadinya masalah tersebut dengan langkah-langkah preventif, tidak jarang kredit tetap menghadapi masalah, yang bisa berkembang dari tidak lancar atau diragukan menjadi macet. Dalam kondisi seperti ini, bank akan mengambil langkah-langkah represif. Langkah awal dari tindakan represif adalah upaya penyelamatan kredit. Jika penyelamatan tersebut tidak berhasil, bank akan melanjutkan dengan tindakan penagihan (Sutan Remy Sjahdeini, 1995 : 2).

Penilaian apakah suatu kredit dikategorikan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas mengacu pada kondisi pembayaran pokok, angsuran, dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan pengembalian dana tersebut. ((Rachmadi Usman, 2001 : 255). Penggolongan kualitas kredit ditetapkan sebagai berikut : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 12 ayat (3) POJK Nomor 40/POJK.03/2019, Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Penentuan Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yaitu : prospek usaha, kinerja debitur, dan, kemampuan membayar

Penggolongan kualitas kredit memiliki beberapa tujuan penting bagi bank, antara lain:

1. **Manajemen Risiko.**

Penggolongan kualitas kredit membantu bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko kredit secara efektif. Dengan mengetahui kualitas masing-masing pinjaman, bank dapat mengambil langkah-langkah pencegahan atau mitigasi untuk mengurangi risiko kerugian.

2. **Penentuan Cadangan Kerugian.**

Dengan mengklasifikasikan kredit berdasarkan kualitasnya, bank dapat menentukan jumlah cadangan kerugian yang perlu disisihkan untuk mengantisipasi potensi kredit macet. Cadangan kerugian ini penting untuk menjaga kesehatan keuangan bank dan memenuhi persyaratan akuntansi serta regulasi.

3. **Kepatuhan Regulasi.**

Otoritas Jasa Keuangan biasanya mengharuskan bank untuk melakukan penggolongan kualitas kredit sebagai bagian dari persyaratan kepatuhan. Hal ini memastikan bahwa bank mengikuti standar yang ditetapkan dan menjaga transparansi serta integritas dalam operasional mereka.

4. **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik.**

Informasi tentang kualitas kredit memungkinkan manajemen bank membuat keputusan yang lebih baik terkait portofolio kredit. Ini termasuk keputusan untuk menyalurkan kredit baru, melakukan restrukturisasi kredit yang bermasalah, atau mengambil tindakan penagihan yang tepat.

5. **Peningkatan Efisiensi Operasional.**

Dengan mengetahui kualitas kredit, bank dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien. Misalnya, kredit dengan risiko tinggi dapat membutuhkan pemantauan dan penanganan lebih intensif dibandingkan dengan kredit berkualitas baik.

6. **Penilaian Kinerja Portofolio Kredit.**

Penggolongan kualitas kredit memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keseluruhan portofolio kredit bank. Ini membantu bank dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan kredit mereka dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

7. Perlindungan Terhadap Kerugian.

Dengan mendeteksi kredit bermasalah lebih awal, bank dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari potensi kerugian besar. Langkah-langkah tersebut meliputi restrukturisasi kredit, penjualan aset yang dijamin, atau renegosiasi syarat pembayaran dengan debitur.

8. Pengelolaan Likuiditas.

Mengetahui kualitas kredit membantu bank dalam mengelola likuiditas mereka. Kredit bermasalah dapat mempengaruhi arus kas bank, sehingga penggolongan kualitas kredit membantu dalam merencanakan kebutuhan likuiditas dan menjaga stabilitas operasional.

9. Peningkatan Kepercayaan Stakeholder.

Pengklasifikasian kualitas kredit yang jelas dan tepat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, seperti investor, pemegang saham, dan nasabah. Ini menunjukkan bahwa bank memiliki sistem manajemen risiko yang solid dan bertanggung jawab dalam mengelola portofolio kreditnya.

10. Pemenuhan Persyaratan Internasional.

Bank yang beroperasi secara internasional harus memenuhi persyaratan kualitas kredit yang ditetapkan oleh standar internasional seperti Basel Accords. Penggolongan kualitas kredit membantu dalam memenuhi persyaratan tersebut dan menjaga reputasi internasional bank.

Dari beberapa tujuan penggolongan kualitas kredit tersebut di atas salah satu poin yang penting adalah untuk mengkalkulasi cadangan kemungkinan timbulnya kerugian, yang berdampak pada portofolio bank dan menjadi indikator penting dalam penilaian kesehatan bank oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, pengklasifikasian kualitas kredit adalah alat penting yang membantu bank dalam menjaga kesehatan keuangan, memenuhi regulasi, dan memastikan operasi yang efisien dan bertanggung jawab.

Bagi debitur, pengklasifikasian kualitas kredit juga memberikan manfaat signifikan, yaitu memberikan penjelasan dan pemahaman yang jelas mengenai kualitas kredit mereka. Hal ini mendorong debitur untuk lebih memperhatikan dan memastikan pembayaran kewajiban dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Bagi debitur yang tidak melakukan pembayaran kewajiban kreditnya dengan baik dan lancar maka terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh debitur dimana bank akan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi kualitas kredit dari debitur dan akan tercatat didalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Semua hal terkait keadaan kredit debitur akan terinformasi sehingga akan merugikan debitur apabila tidak melakukan pembayaran kewajiban kredit dengan baik dan lancar, terutama jika mereka ingin mengajukan pinjaman kembali dikemudian hari.

Adanya penggolongan kualitas kredit ini bank tidak bisa dengan seenaknya sendiri menyelesaikan kredit yang masuk dalam kategori kredit bermasalah hanya bertujuan untuk menghindari dari penggolongan kualitas kredit yang berpengaruh terhadap pencadangan potensi kerugian bagi bank, sehingga seolah-olah kategori penilaian portofolio bank dinilai dalam kategori bank yang sehat. Bank dilarang menyelesaikan kredit bermasalah dengan upaya penyelesaian yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian kredit yang hanya bertujuan untuk mendapatkan penilaian seolah-olah bank masuk dalam kategori bank yang sehat akan sangat merugikan bagi para stakeholder, termasuk investor, pemegang saham, dan nasabah. Kondisi ini apabila dibiarkan terus menerus tanpa adanya pengawasan dan tindakan yang tegas dari otoritas yang berwenang akan berdampak pada keberlangsungan bisnis perbankan. Untuk itu cara-cara penyelesaian kredit bermasalah harus benar-benar dipastikan telah memenuhi prosedur yang benar dan memenuhi unsur kehati-hatian.

Larangan Kapitalisasi Bunga Dan Denda Kredit (Plafondering)

Guna perbaikan kredit dimana awalnya termasuk dalam kategori diragukan atau macet, bank mengambil langkah-langkah penyelamatan agar kredit tersebut kembali lancar. Langkah-langkah penyelamatan kredit ini akan dituangkan dalam perjanjian penyelamatan kredit. Bentuk-bentuk penyelamatan kredit tersebut dapat meliputi :

1. Penjadwalan ulang (*rescheduling*), yaitu mengubah syarat kredit yang hanya mencakup perubahan jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu pinjaman.
2. Perubahan syarat (*reconditioning*), yaitu mengubah sebagian atau seluruh syarat kredit, yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau ketentuan lainnya, asalkan tidak mempengaruhi batas maksimum saldo kredit.
3. Restrukturisasi, yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang mencakup:
 - a. Penambahan dana oleh bank dan/atau;
 - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru; dan/atau
 - c. Konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan saham dalam perusahaan, yang mungkin disertai dengan penjadwalan ulang dan/atau perubahan syarat lainnya.((Rachmadi Usman, 2001 : 293).

Untuk melakukan restrukturisasi kredit berdasarkan ketentuan POJK Nomor 40/POJK.03/2019, Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, di dalam ketentuan Pasal 53, hanya debitur yang memenuhi kriteria yang dapat dilakukan restrukturisasi kreditnya oleh bank yaitu :

- a. debitur sedang dalam keadaan kesulitan membayar pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. debitur masih mempunyai kemampuan usaha yang baik dan dinilai memiliki kemampuan memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Di dalam ketentuan Pasal 54 bank tidak diperbolehkan melaksanakan Restruktur Kredit hanya untuk tujuan :

- a. Perbaikan kualitas Kredit; dan/atau
- b. Menghindar dari kewajiban peningkatan pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA), tanpa mengacu pada kriteria debitur yang telah ditentukan.

Pada saat melaksanakan penyelamatan kredit bermasalah, bank harus mempertimbangkan dengan seksama kondisi usaha debitur. Jika usaha debitur masih berjalan meskipun mengalami penurunan yang mempengaruhi kemampuan pembayaran, tetapi tetap memiliki prospek, maka bank dapat menyelesaikan masalah dengan melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan syarat (*reconditioning*), atau restrukturisasi (*restructuring*). Namun, bagi debitur yang sudah kehilangan prospek usaha, penyelesaian kredit macet dilakukan dengan menjual aset jaminan atau aset lainnya milik debitur untuk melunasi kewajiban kredit kepada bank. Upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melalui penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan kredit bagi debitur yang sudah tidak mempunyai kemampuan usaha lagi adalah langkah kurang tepat, karena hanya akan memberatkan dari sisi debitur. Penambahan fasilitas kredit atau plafond kredit hanya akan menambah beban kewajiban kredit dari debitur yang kreditnya sudah macet semakin besar. Apalagi penyelesaian kredit bagi debitur yang sudah tidak memiliki prospek usaha tersebut dilakukan dengan melakukan kapitalisasi bunga dan denda kredit yang tertunggak kedalam pokok kredit (*plafondering*), hal ini semakin memberatkan dan merugikan debitur.

Penambahan fasilitas kredit atau plafond kredit bagi debitur yang masih mempunyai kemampuan usaha, melalui restrukturisasi, diperbolehkan dengan syarat bahwa penambahan tersebut dicantumkan dalam perjanjian kredit yang merupakan bagian dari restrukturisasi kredit.

Selain itu, hal ini harus dilaporkan kepada OJK sebagai kredit yang sedang direstrukturisasi, sehingga penentuan kolektibilitas kredit mengikuti ketentuan restrukturisasi kredit. Kolektibilitas kredit dapat kembali dinyatakan lancar dan keluar dari kategori restrukturisasi apabila debitur memenuhi persyaratan restrukturisasi yang ditetapkan dan tercantum dalam perjanjian kredit. Penambahan fasilitas kredit kepada debitur bermasalah dengan melakukan pelunasan fasilitas kredit macet dan dimunculkan fasilitas baru tanpa mencantumkan bahwa penambahan plafond atau fasilitas kredit dalam rangka restrukturisasi kredit adalah langkah penyelesaian yang dilarang, karena hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas kredit. Apalagi, jika penambahan fasilitas kredit atau plafond diberikan kepada debitur yang sudah tidak mempunyai kemampuan usaha yang baik, dan penambahan tersebut digunakan untuk kapitalisasi bunga dan denda kredit (*plafondering*), hal ini dapat merugikan debitur serta nasabah penyimpan. Langkah-langkah semacam ini hanya menguntungkan bank, seolah-olah bank berada dalam kondisi sehat, padahal sebenarnya berisiko bagi kelangsungan bisnis perbankan. Ketidaktransparanan mengenai kondisi kesehatan bank dan penerapan langkah penyelesaian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan serta prinsip kehati-hatian dapat memengaruhi tingkat kesehatan bank dan berpotensi menyebabkan krisis ekonomi, terutama bagi bank yang sistemik.

Praktik penyelamatan kredit macet dengan melalui penambahan plafond kredit atau mengakumulasi bunga tertunggak, yang biasa disebut sebagai *plafondering* kredit, tidak diperbolehkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum (POJK PPKPB). Selain tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank, praktik *plafondering* kredit juga merugikan nasabah debitur dengan menambah beban utang dan bunga yang lebih besar. (Lastuti Abubakar, Tri Handayani, 2018 : 67-68). Menurut Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) No: 42/POJK.03/2017, pada BAB VII tentang Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah, khususnya pada huruf A mengenai Pendekatan Kredit atau Pembiayaan Bermasalah, poin 4 menyatakan: “ Untuk itu seluruh pejabat Bank khususnya yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani Kredit atau Pembiayaan bermasalah, dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut : 4) Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond Kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik *plafondering* kredit.”. Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik *plafondering* kredit untuk penyelesaian kredit bermasalah yang selama ini digunakan oleh bank kini sudah dilarang. Jika praktik kapitalisasi bunga dan denda kredit (*plafondering*) masih diterapkan dalam penyelesaian kredit bermasalah, maka hal ini dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang telah ditetapkan. Kedua ketentuan ini bersifat memaksa, dan menurut Pasal 49 Ayat (2.b) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 63 Ayat (2.b) Undang-Undang Perbankan Syariah, pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan. (Lastuti Abubakar, Tri Handayani, 2018 : 80).

Plafondering adalah istilah yang mengacu pada pembatasan atau larangan kapitalisasi bunga dan denda kredit. Kapitalisasi bunga dan denda adalah praktik menambahkan bunga yang belum dibayar dan denda ke dalam pokok pinjaman, sehingga jumlah pokok pinjaman meningkat dan bunga dihitung atas pokok yang lebih besar ini. Praktik ini dapat menyebabkan beban utang yang semakin besar bagi debitur dan berpotensi meningkatkan risiko kredit macet. Oleh karena itu, banyak negara dan otoritas keuangan melarang atau membatasi praktik ini untuk melindungi

debitur dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Larangan Kapitalisasi Bunga dan Denda memiliki Tujuan untuk melindungi kepentingan para stakeholder diantaranya adalah :

1. Perlindungan Konsumen.
 - a. Menghindari peningkatan beban utang yang berlebihan bagi debitur dikarenakan adanya penambahan bunga dan denda kedalam pokok pinjaman.
 - b. Mencegah eksploitasi debitur melalui praktik bunga berbunga yang tidak adil yang hanya menguntungkan pihak bank dengan cara-cara yang tidak benar.
2. Stabilitas Sistem Keuangan.
 - a. Mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet yang dapat berdampak negatif pada kesehatan keuangan bank.
 - b. Menjaga integritas sistem perbankan dan mencegah krisis keuangan akibat tingginya tingkat utang yang tidak terkelola.
3. Transparansi dan Keadilan.
 - a. Meningkatkan transparansi dalam perhitungan bunga dan denda.
 - b. Memastikan perlakuan yang adil terhadap debitur dalam pengelolaan kredit.

Di sisi lain apabila larangan kapitalisasi bunga dan denda ini benar-benar diterapkan maka akan memberikan dampak :

1. Bagi Debitur.
 - a. Beban utang lebih terkontrol dan tidak meningkat secara eksponensial.
 - b. Mendorong debitur untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka.
2. Bagi Bank
 - a. Mengurangi risiko terjadinya kredit macet dan potensi kerugian.
 - b. Mendorong bank untuk lebih selektif dalam memberikan kredit dan lebih proaktif dalam pemantauan dan penagihan kredit.
3. Bagi Perekonomian
 - a. Menjaga stabilitas keuangan makro dengan mengurangi risiko sistemik yang disebabkan oleh tingginya tingkat utang.
 - b. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan kredit yang lebih sehat.

Larangan kapitalisasi bunga dan denda kredit diimplementasikan melalui berbagai regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Keuangan dan Pemerintah. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan larangan ini antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan
 - a. Penerapan undang-undang yang mengatur tentang pembatasan kapitalisasi bunga dan denda.
 - b. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap bank yang melanggar aturan.
2. Pengawasan Otoritas Keuangan
 - a. Otoritas Keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dan audit terhadap praktek perbankan.
 - b. Penerapan sanksi terhadap bank yang melanggar aturan.
3. Edukasi dan Sosialisasi
 - a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman debitur mengenai hak dan kewajiban mereka terkait kredit.
 - b. Menginformasikan secara jelas dan transparan perihal perhitungan bunga dan denda.

Dengan adanya larangan kapitalisasi bunga dan denda kredit, diharapkan tercipta sistem perbankan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Ini juga merupakan langkah penting dalam perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

KESIMPULAN

1. Pengklasifikasian kualitas kredit penting untuk bank karena dapat membantu mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko kredit secara efektif. Bank juga dapat menentukan jumlah cadangan kerugian yang perlu disisihkan guna mengantisipasi kredit macet. Tujuan utama penggolongan kualitas kredit adalah untuk menghitung cadangan potensi kerugian, yang akan mempengaruhi portofolio bank dan menjadi salah satu indikator penilaian kesehatan bank. Dengan demikian, penggolongan kualitas kredit adalah alat penting yang membantu bank dalam menjaga kesehatan keuangan, memenuhi regulasi, dan memastikan operasi yang efisien dan bertanggung jawab. Untuk Debitur penggolongan kualitas kredit juga memiliki manfaat yang cukup penting, dimana debitur akan mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang memadai mengenai kualitas kredit yang mereka lakukan, sehingga mereka akan terdorong untuk memenuhi pembayaran kewajiban dengan baik dan lancar. Adanya penggolongan kualitas kredit ini bank tidak bisa dengan seenaknya sendiri menyelesaikan kredit yang masuk dalam kategori kredit bermasalah hanya bertujuan untuk menghindari dari penggolongan kualitas kredit yang berpengaruh terhadap pencadangan potensi kerugian bagi bank, sehingga seolah-olah kategori penilaian portofolio bank dinilai dalam kategori bank yang sehat.
2. Dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah bank dilarang mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan peraturan dan prinsip kehati-hatian. Praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau mengakumulasi tunggakan bunga melalui kapitalisasi, yang dikenal sebagai plafondering kredit, dilarang untuk digunakan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017, praktik plafondering kredit tidak dapat dijadikan alternatif dalam penyelesaian kredit bermasalah. Selain tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank, praktik ini juga merugikan nasabah debitur dengan menambah beban utang dan bunga yang lebih tinggi. Larangan Kapitalisasi Bunga dan Denda memiliki Tujuan untuk memberikan perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan transparansi dan keadilan. Penerapan larangan kapitalisasi bunga dan denda akan memberikan manfaat positif bagi debitur, bank, dan perekonomian. Untuk itu larangan kapitalisasi bunga dan denda kredit diimplementasikan melalui berbagai regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Keuangan dan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbankan*, Depok : Kencana.
- [3] Sutan Remy Sjahdeini, 1995, *Menanggulangi Kredit Bermasalah*, Makalah disajikan sebagai materi Kuliah Program Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Surabaya, Universitas Surabaya, Surabaya.
- [4] Lastuti Abubakar, 2018, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Rechtidee*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2018.
- [5] Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- [6] Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- [7] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019, Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- [8] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 42/POJ.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan.